

**PERAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH
(Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
ALIYAH ZAHRA FITRI
NPM 2216021077**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH
(Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)**

Oleh

ALIYAH ZAHRA FITRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

Oleh
ALIYAH ZAHRA FITRI

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung sangat penting dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun, hasil kajiannya belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Tahun 2024 Balitbangda menghasilkan 11 kajian, dan hanya 2 yang dimanfaatkan, hal ini menunjukkan bahwa peran Balitbangda dalam mendorong kebijakan berbasis riset masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Balitbangda dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan teori peran Soerjono Soekanto (2001) yang mencakup empat dimensi yaitu kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balitbangda belum berperan dengan baik secara keseluruhan, karena dimensi tanggung jawab masih lemah. Pada dimensi kewenangan, tujuan, dan pelaksanaan tugas, Balitbangda telah menjalankan perannya sesuai dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021, menyelaraskan program kerja dengan visi-misi RPJMD, serta menghasilkan 11 kajian yang mendukung kebijakan strategis daerah. Namun, pada dimensi tanggung jawab masih terdapat kendala pada aspek evaluasi dan pengendalian mutu. Meski telah dibentuk Tim Pengendali Mutu berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, pelaksanaannya belum optimal sehingga mekanisme pengawasan mutu kajian belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Peran, Balitbangda, Rekomendasi Kebijakan, Kebijakan Berbasis Bukti

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE REGIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
AGENCY IN FORMULATING LOCAL GOVERNMENT POLICY
RECOMMENDATIONS
(A Study at the Regional Research and Development Agency of Lampung
Province)**

By

ALIYAH ZAHRA FITRI

The role of the Regional Research and Development Agency of Lampung Province (Balitbangda) is very important in supporting evidence-based policy. However, the results of its studies have not been fully utilized by regional government agencies. In 2024, the agency produced 11 studies, and only 2 were utilized, indicating that its role in promoting research-based policy is still not optimal. This study aims to determine the role of the agency in formulating regional government policy recommendations. This research uses a descriptive qualitative approach through interviews, documentation, and observation, based on the role theory of Soerjono Soekanto (2001), which includes four dimensions: authority, objectives, responsibilities, and task implementation. The results show that the agency has not performed its role optimally overall, as the responsibility dimension remains weak. In terms of authority, objectives, and task implementation, the agency has carried out its role in accordance with the legal basis, namely Regional Regulation of Lampung Province Number 6 of 2021 and Governor Regulation of Lampung Province Number 59 of 2021, aligning work programs with the vision and mission of the RPJMD, and producing 11 studies that support regional strategic policies. However, in the responsibility dimension, there are still obstacles in the aspects of evaluation and quality control. Although a Quality Control Team has been established based on Minister of Home Affairs Regulation Number 17 of 2016, its implementation has not been optimal, resulting in an ineffective study quality supervision mechanism.

Keywords: *Role, Balitbangda, Policy Recommendation, Evidence-Based Policy*

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

**: PERAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi di Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Aliyah Zahra Fitri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216021077

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing


Andri Marta, S.I.P., M.I.P
NIP. 1990030420019031008


Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.
NIP. 199009182024212001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Andri Marta, S.I.P., M.I.P



Sekretaris : Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Maret 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



Aliyah Zahra Fitri
NPM 2216021077

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 15 November 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, Bapak Reynul dan Ibu Viria Pendidikan penulis dimulai di TK Aisyiyah 21 Rawamangun yang diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah 24 Rawamangun dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Nurul Fikri Boarding School Serang hingga lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAS Future Gate Bekasi dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswi jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung pada program pendidikan strata satu (S1). Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cempaka Timur, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2025.

Penulis juga melaksanakan MBKM Magang selama 6 (enam) bulan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung (Balitbangda). Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam menjalani pendidikan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus. Penulis merupakan anggota bidang *public relation* di UKM English Society (ESo) Universitas Lampung dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Lampung pada tahun 2025.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Qs. Al-Baqarah:286)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu”

(Qs. Ad-Dhuha: 3)

“Wahai anak Adam, jika engkau mendatangi-Ku dengan dosa sepenuh bumi kemudian engkau tidak berbuat syirik pada-Ku dengan sesuatu apa pun, maka Aku akan mendatangi-mu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula”

(HR. Tirmidzi No. 3540)

“Hiduplah untuk Tuhan dan dirimu sendiri, dua hal yang pasti dan layak menjadi pegangan di dunia yang tak pasti.”

(Aliyah Zahra Fitri)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Dengan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya ini untuk orang tuaku yang sangat kusayangi.

Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku. Tanpa do'a yang kalian lantunkan setiap harinya, maka aku tidak akan sampai pada titik ini.

Terima kasih kepada seluruh dosen, staff, dan teman-teman seperjuangan di jurusan ilmu pemerintahan.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, karena atas Rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si. Selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik
5. Bapak Andri Marta, S.I.P., M.I.P. dan ibu Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak Dr. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku dosen penguji.
7. Seluruh dosen dan staff jurusan ilmu pemerintahan universitas lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan serta arahan dan bantuan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswi.

8. Kepada Ayah Reynul dan Bunda Ria yang aku sayangi, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang yang teramat tulus yang tidak akan pernah bisa penulis gantikan, terima kasih atas segala do'a, dukungan dan pengorbanannya untuk penulis sehingga penulis bisa sampai di fase hidup ini dengan menjadi diri sendiri yang sebaik-baiknya. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih hingga hari ini termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari do'a dan harapan kalian.
9. Kepada Eyangkung Irdiat, Eyangti Ery, dan Nenek Hartati terima kasih atas segala do'a yang kalian panjatkan selama ini dan atas segala dukungan terhadap setiap keputusan yang penulis ambil.
10. Kepada adikku Naufal terima kasih sudah menjadi adik yang senantiasa penulis anggap sebagai sahabat penulis, semoga kelak dirimu tumbuh lebih baik dari kakaknya.
11. Kepada seluruh keluarga besar penuli yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah menjadi keluarga besar yang menyayangi penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis sedari SMA, Nada, Asiyah, Brenda, Bila, Ghina, Khalisha, Dinda, Rahnia dan Gita. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk pulang sejenak.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah penulis anggap seperti keluarga Weda, Della, Puri, Aini, Lia dan Montes. Terima kasih sudah menemani setiap masa yang ada selama penulis berada di perantauan.
14. Kepada teman-teman KKN Desa Cempaka Timur, Syahwa, Eka, dan Sindi. Terima kasih atas segala dukungannya.
15. Kepada teman-teman ilmu pemerintahan Angkatan 2022, terima kasih
16. Kepada Ibu Eliyati selaku Katimja Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung, terima kasih atas segala bentuk motivasi dan bantuannya terhadap penulis selama melakukan penelitian di Balitbangda Provinsi Lampung.
17. Kepada Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung khususnya tim perencanaan dan bidang pemerintahan dan sosial

budaya. Terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya selama penulis magang hingga melakukan penelitian

18. Kepada seluruh informan penelitian penulis, terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Terakhir, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk diri sendiri atas segala usaha dan upaya jatuh bangunnya selama ini, atas segala kekuatan yang di bangun sebagai fondasi untuk bertahan hingga titik ini. Terima kasih sudah menjadi diri sendiri dan sudah bertahan hingga hari ini.

Semoga tuhan yang maha esa senantiasa memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi semua pihak

Bandar Lampung,
Penulis

Aliyah Zahra Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Peran	17
2.1.1 Pengertian Peran	17
2.2 Tinjauan Lembaga atau Badan Penelitian	23
2.2.1 Pengertian Lembaga atau Badan Penelitian	23
2.2.2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	23
2.3 Tinjauan Rekomendasi Kebijakan	25
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik	25
2.3.2 Tahapan Perumusan Kebijakan	25
2.3.3 Rekomendasi Kebijakan	27
2.4 Kerangka Pemikiran	29
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis Data	31
3.4.1 Data Primer	31

3.4.2 Data Sekunder	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.1 Wawancara	32
3.5.2 Dokumentasi	34
3.5.3 Observasi.....	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.6.1 Reduksi Data	35
3.6.2 Penyajian Data	35
3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	36
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	36
3.7.1 Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	36
3.7.2 Uji Keteralihan (<i>Transferability</i>).....	36
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	37
3.8.1 Pengeditan Data (<i>Editing</i>).....	37
3.8.2 Interpretasi Data.....	37
IV. GAMBARAN UMUM	38
4.1 Sejarah Balitbangda Provinsi Lampung.....	38
4.2 Visi dan Misi Balitbangda Provinsi Lampung	39
4.3 Struktur Organisasi.....	40
4.4 Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Lampung.....	41
4.5 Sumber Daya Balitbangda Provinsi Lampung.....	48
4.6 Sarana Pendukung.....	50
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Hasil	53
5.2 Pembahasan.....	94
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	115
6.1 Simpulan	115
6.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kajian yang Dihasilkan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2022-2024	4
Tabel 1.2 Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan Perangkat Daerah Tahun 2022-2024	7
Tabel 1.3 Skor IID Provinsi Lampung Tahun 2022 sampai 2024.....	10
Tabel 1.4 Perolehan Skor IID Tahun 2024 Sumatera.....	11
Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Narasumber yang akan diwawancara.....	32
Tabel 4.1 Data Pegawai Menurut Pendidikan.....	48
Tabel 4.2 Data Pegawai Menurut Golongan	49
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pendukung di Balitbangda	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Lampung.....	40
Gambar 5.1 Landasan Hukum Balitbangda Provinsi Lampung.....	95
Gambar 5.2 Pergub Provinsi Lampung Tentang Riset dan Inovasi Daerah.....	96
Gambar 5.3 Dokumen Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Balitbangda Provinsi Lampung.....	98
Gambar 5.4 Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Lampung.....	100
Gambar 5.5 Rencana Kajian Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2025.....	102
Gambar 5.6 Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung	103
Gambar 5.7 Keterkaitan Balitbangda dengan Misi ke 1 dan Misi ke-3 RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.....	104
Gambar 5.8 Kumpulan Policy Paper Balitbangda Tahun 2024	106
Gambar 5.9 FGD Balitbangda Provinsi Lampung dengan UPTD Museum Transmigrasi.....	107
Gambar 5.10 Salah satu KAK Kajian Balitbangda Provinsi Lampung	111
Gambar 5.11 Dokumentasi Pelaksanaan FGD.....	112
Gambar 5.12 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung.....	113

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Balitbangda	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
IID	: Indeks Inovasi Daerah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RKPD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU	: Undang-undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi saat ini menuntut adanya kebijakan publik yang akurat, adaptif, serta berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kebijakan yang baik tidak hanya tercipta dari pertimbangan politik semata, tetapi harus dilandasi oleh hasil penelitian serta pengkajian ilmiah sehingga dapat menjawab permasalahan nyata di masyarakat (Davies dkk., 2004). Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seharusnya mampu menghasilkan perubahan positif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang disusun pemerintah perlu memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat (Dinworo, 2013). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah menegaskan terkait pentingnya *evidence-based policy* untuk memastikan setiap kebijakan memiliki landasan ilmiah serta berdampak langsung pada masyarakat (Muhamad, 2024).

Dalam konteks tersebut, keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) memiliki posisi strategis sebagai penyedia data, informasi, serta rekomendasi ilmiah dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Balitbangda Provinsi Lampung merupakan lembaga penelitian yang ada di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk menghasilkan kajian-kajian yang dapat menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) dalam meningkatkan pembangunan di provinsi Lampung. Kajian-kajian tersebut di rekomendasikan kepada perangkat daerah

atau *stake holder* terkait sebagai bentuk rekomendasi kebijakan agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan pemerintah Provinsi Lampung atau biasa disebut dengan *Policy Paper*.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang riset dan inovasi daerah pada pasal 13 terkait diseminasi bahwa hasil riset disampaikan oleh pelaksana riset, baik dari sumber daya manusia maupun lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para pembuat kebijakan dengan tujuan agar hasil riset tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh para pembuat kebijakan. Peran Balitbangda juga diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Riset dan Inovasi pada pasal 42 hingga pasal 46 terkait pemanfaatan hasil riset yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk implementasi kebijakan daerah. Maka, dapat disimpulkan bahwa peran Balitbangda sebagai *think tank* dalam menghasilkan rumusan kebijakan strategis dalam menyelesaikan permasalahan dengan bentuk kajian atau riset yang berkualitas dan berkelanjutan.

Secara kedudukan dan tugas fungsi, Balitbangda Provinsi Lampung berdasarkan Pergub Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar menyusun kebijakan. Balitbangda bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang kelitbang yang mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, hingga evaluasi kebijakan daerah. Artinya, fungsi Balitbangda tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup pemantauan dan evaluasi (*monev*) terhadap pelaksanaan riset dan inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Secara operasional, Balitbangda melaksanakan berbagai fungsi penting seperti penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan riset dan inovasi, pengkajian kebijakan daerah, serta pelaporan hasil pelaksanaan riset. Selain itu, Balitbangda berperan dalam membangun sinergi dan kerja sama dengan lembaga riset dalam maupun luar

negeri, lembaga pendidikan tinggi, dan sektor swasta, serta membina perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi agar hasil kajian dapat diimplementasikan secara nyata. Hasil-hasil riset yang diperoleh disebarluaskan melalui publikasi dan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan berbasis penelitian yang disampaikan kepada Gubernur serta perangkat daerah. Dengan demikian, Balitbangda berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya menghasilkan kajian ilmiah, tetapi juga mengawal penerapan dan efektivitas kebijakan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, fasilitasi, dan advokasi terhadap OPD pelaksana, sehingga kebijakan pemerintah daerah benar-benar berbasis pada hasil penelitian dan inovasi yang terukur.

Adapun peran lembaga penelitian daerah dalam menghasilkan rumusan kebijakan terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Lampung belum diimplementasikan secara keseluruhan oleh Perangkat Daerah terkait. Hal ini menyebabkan peran pemerintah daerah belum menerapkan *evidence-based policy*.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2024, bahwa Balitbangda memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. Presentase Rumusan Kebijakan (*Policy Paper*) yang Dimanfaatkan dan atau Didesiminasikan
2. Skor Indeks inovasi daerah

Berkenaan IKU yang diampu oleh Balitbangda tersebut dapat digambarkan untuk tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yang meliputi kajian sektor pertanian, pendidikan, perikanan, perkebunan, serta transportasi. Jika dibandingkan dengan IKU tahun 2022 dan 2023 menghasilkan kajian sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan. Adapun sandingan data kinerja Balitbangda untuk rekomendasi kebijakan tahun 2022-2024 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Kajian yang Dihasilkan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kajian yang Dihasilkan	Rincian Kajian
2022	10	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="762 517 1315 663">1. Swakelola Kajian Hilirisasi Pisang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Lampung <li data-bbox="762 680 1315 770">2. Kajian Penyusunan Kebijakan Tata Niaga Lada di Provinsi Lampung <li data-bbox="762 788 1315 934">3. Kajian Peningkatan Kualitas Garam di Pulau Legundi menuju Pasar Global dan Internasional <li data-bbox="762 952 1315 1097">4. Kajian Bahan Substitusi untuk Pakan Ikan Apung Berkualitas Berbasis Sumber Daya Lokal di Lampung <li data-bbox="762 1115 1315 1205">5. Swakelola Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah <li data-bbox="762 1223 1315 1312">6. Swakelola Kajian Evaluasi Kebijakan Bidang Perindustrian <li data-bbox="762 1330 1315 1420">7. Kajian Desain Pembelajaran Efektif Pasca Pandemi Covid-19 <li data-bbox="762 1438 1315 1583">8. Pengembangan Budidaya Ikan di Area Bekas Penambangan di Kabupaten Lampung Timur <li data-bbox="762 1601 1315 1747">9. Kajian Desain Besar (Grand Design) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang <li data-bbox="762 1765 1315 1926">10. Kajian Riset Parameter Hidrologi pada DAS (Daerah Aliran Sungai) sebagai landasan Perencanaan tata ruang

Tahun	Jumlah Kajian yang Dihasilkan	Rincian Kajian
2023	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Hilirisasi Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Lampung 2. Peningkatan Daya Saing Komoditas Strategis Coklat Lampung 3. Pemetaan Potensi Pengembangan Usaha Garam di Provinsi Lampung 4. Mitigasi Permukiman Kumuh disekitar Pantai Kota Bandar Lampung 5. Evaluasi Strategi Pengembangan Pendidikan Vokasi di Provinsi Lampung 6. Pengembangan Briket Cangkang Sawit sebagai Upaya Ketahanan Energi Pedesaan 7. Revitalisasi Manajemen Transportasi Publik AKDP di Provinsi Lampung 8. Kajian Aksi Pemerintah Kolaboratif : Studi Pada Pemerintah Desa 9. Kajian Pengelolaan DAS Lampung 10. Kajian Optimalisasi Pendapatan Petani Melalui Inovasi Teknologi dan Kelembagaan di Provinsi Lampung
2024	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Limbah Kayu Karet Menjadi Cuka Kayu Untuk Pestisida Nabati 2. Pengembangan Limbah Batang Singkong untuk Mendukung

Tahun	Jumlah Kajian yang Dihasilkan	Rincian Kajian
		<p>Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung</p> <p>3. Transformasi Wisata Berkelanjutan melalui Konsep Zero Waste</p> <p>4. Strategi Pengembangan Museum Transmigrasi Provinsi Lampung</p> <p>5. Kesejahteraan Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil dan Strategi Pengembangannya di Provinsi Lampung</p> <p>6. Evaluasi Sumbangan Komite Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan Siswa Di SMA Negeri dengan Keberhasilan Siswa di SMA Negeri</p> <p>7. Pemanfaatan Limbah Gedebok Pisang untuk Pakan Ternak Sebagai Pengembangan Sistem Ekonomi Terpadu</p> <p>8. Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan di Kawasan Metropolitan Bandar Lampung</p> <p>9. Strategi Pengelolaan DAS berkelanjutan</p> <p>10. Alternatif Inovasi dari Panen raya tanaman Jagung</p> <p>11. Menggali Efektivitas dan Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah</p>

Sumber: Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa kajian yang dihasilkan dari tahun 2022 ke 2023 memperoleh jumlah yang sama sebanyak 10 (sepuluh) kajian disetiap tahunnya. Kemudian di tahun 2024 kajian yang dihasilkan oleh Balitbangda mengalami kenaikan sebanyak satu kajian dari dua tahun sebelumnya yaitu menjadi 11 (sebelas) kajian. Dapat disampaikan bahwa Balitbangda setiap tahunnya telah aktif dan menghasilkan kajian-kajian strategis. Hal tersebut harapannya dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait secara berkelanjutan.

Adapun kajian yang telah dihasilkan oleh Balitbangda dari tahun 2022-2024 yang dimanfaatkan atau ditindak lanjuti oleh perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan Perangkat Daerah Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan	Rincian Kajian
2022	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swakelola Kajian Hilirisasi Pisang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Lampung 2. Kajian Peningkatan Kualitas Garam di Pulau Legundi menuju Pasar Global dan Internasional 3. Swakelola Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah
2023	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Potensi Pengembangan Usaha Garam di Provinsi Lampung

Tahun	Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan	Rincian Kajian
		2. Evaluasi Strategi Pengembangan Pendidikan Vokasi di Provinsi Lampung
2024	2	1. Strategi Pengembangan Museum Transmigrasi Provinsi Lampung 2. Kesejahteraan Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil dan Strategi Pengembangannya di Provinsi Lampung

Sumber: Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2022 kajian yang dihasilkan oleh Balitbangda mendapat respon yang cukup baik, dimana terdapat 3 (tiga) kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah dari 10 (sepuluh) kajian yang dihasilkan. Kemudian pada tahun 2023 jumlah kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah mengalami penurunan sebanyak satu poin yaitu menjadi 2 (dua) kajian yang dimanfaatkan dari 10 (sepuluh) kajian yang dihasilkan. Selanjutnya tahun 2024 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah mengalami penurunan sebanyak satu poin yaitu menjadi 2 (dua) kajian yang dimanfaatkan dari 11 (sebelas) kajian yang dihasilkan.

Adapun dua kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah tahun 2024 yaitu berjudul “Strategi Pengembangan Museum Transmigrasi Provinsi Lampung” yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, kemudian kajian yang kedua adalah “Kesejahteraan Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil dan Strategi Pengembangannya di Provinsi Lampung” yang ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.

Fenomena pembangunan daerah yang tidak berlandaskan riset tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, tetapi dalam lingkup nasional masih banyak kebijakan publik yang dirumuskan tanpa didukung hasil penelitian yang memadai yang akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat. Qodari (dalam Asmara, 2017) mencontohkan dua kebijakan makro yang diambil tanpa landasan riset, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai konflik sosial di banyak daerah akibat minimnya kajian terhadap dampak kebijakan sebelum diimplementasikan. Penerapan kebijakan kenaikan harga BBM, misalnya, memunculkan perdebatan di kalangan ahli karena keputusan tersebut tidak didahului dengan penelitian yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Zamroni (dalam Asmara, 2017), pemerintah beralasan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun sejumlah ekonom seperti Kwik Kian Gie menolak argumen tersebut dengan mempertanyakan mengapa Indonesia yang kaya sumber daya alam justru harus bergantung pada impor energi.

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim (2011) (dalam Asmara, 2017), mengakui bahwa banyak kebijakan pendidikan di Indonesia tidak didasarkan pada hasil riset dan analisis mendalam. Penelitian pendidikan selama ini cenderung bersifat reaktif dan hanya menjawab persoalan jangka pendek, tanpa strategi kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh pernyataan anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Rohmani (2011) (Republika, 19 Agustus 2011, (Asmara, 2017) yang menilai bahwa perubahan tata cara penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun aspek hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan efek negatif dan kondisi sosiologis sebelum menetapkan suatu kebijakan pendidikan di Indonesia stagnan, bahkan berpotensi mengalami kemunduran.

Berdasarkan konteks daerah dalam hal ini adalah Provinsi Lampung, arah kebijakan penelitian dan pengembangan daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu program prioritasnya adalah memperkuat peran Balitbangda sebagai penghasil kajian ilmiah dan inovasi daerah. Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran penelitian, kurangnya kolaborasi lintas instansi, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam menganalisis dan menerapkan hasil riset menjadi rumusan kebijakan yang operasional.

Selain menghasilkan kajian-kajian Balitbangda Provinsi Lampung juga memiliki tugas untuk menginput inovasi-inovasi yang ada di Provinsi Lampung yang kemudian dilombakan secara nasional. Kegiatan Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan laporan inovasi daerah yang terdapat di Provinsi Lampung yang diinput dalam aplikasi kemudian dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan IID ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. IID merupakan bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing yang akan dilakukan pemeringkatan yang berguna untuk pemetaan, pembinaan, dan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator Indeks Inovasi Daerah menggunakan data inovasi yang telah berjalan minimal dua tahun. Berikut merupakan data terkait perolehan skor IID Provinsi Lampung selama tiga tahun yaitu tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1.3 Skor IID Provinsi Lampung Tahun 2022 sampai 2024

Tahun	Skor	Predikat
2022	60,90	Sangat Inovatif
2023	58,70	Inovatif
2024	65,50	Sangat Inovatif

Sumber: Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa dari tahun 2022 ke 2023 perolehan skor IID Provinsi Lampung mengalami penurunan skor sebanyak 2,2 poin yang akhirnya dengan poin tersebut predikat IID Provinsi Lampung turun menjadi Inovatif. Tetapi, pada tahun 2024 skor IID Provinsi Lampung naik secara pesat yang melebihi skor pada dua tahun sebelumnya yaitu mendapatkan skor 65,50 dengan predikat Sangat Inovatif, dengan perolehan tersebut Provinsi Lampung berhasil menduduki peringkat ketiga diantara provinsi lainnya di Sumatera. Berikut dibawah ini adalah perbandingan perolehan skor IID pada tahun 2024 dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera.

Tabel 1.4 Perolehan Skor IID Tahun 2024 Sumatera

No.	Pemerintah Daerah Provinsi	Skor	Predikat
1	Sumatera Barat	88,92	Sangat Inovatif
2	Sumatera Selatan	75,79	Sangat Inovatif
3	Lampung	65,50	Sangat Inovatif
4	Sumatera Utara	59,93	Sangat Inovatif
5	Jambi	58,59	Inovatif
6	Bangka Belitung	54,64	Inovatif
7	Riau	53,63	Inovatif
8	Bengkulu	53,39	Inovatif

Sumber: Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas merupakan perolehan skor IID oleh Provinsi lainnya yang ada di Sumatera. Dari perolehan skor IID tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan inovasi kebijakan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mengatasi permasalahan daerah baik idalam semua sektor.

Dalam mendukung analisis terhadap peran lembaga penelitian dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, diperlukan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai bagaimana lembaga penelitian, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjalankan fungsi dan kontribusinya dalam proses

perumusan kebijakan publik. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih jarang dikaji, khususnya terkait peran lembaga penelitian daerah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Peran Litbang dalam Pengambilan Kebijakan Strategis dan Pemecahan Masalah di Kota Bandung (Sagita dkk., 2024)	Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil kelitbangan yang dilakukan Kota Bandung masih belum dilaksanakan secara optimal dalam menjawab berbagai macam dinamika serta persoalan lingkup pemerintahan Kota Bandung. Perlu serangkaian strategi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang dalam hal ini sebagai cara untuk mendorong pembangunan daerah. Salah satu strateginya adalah memfokuskan litbang kepada upaya-upaya perluasan cakupan substansi dan kualitas penelitian.
Optimalisasi Peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Daerah (Fitrianto dkk., 2024)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran dan fungsi Balitbangda harus disesuaikan dengan tugas pokoknya serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk menilai apakah kegiatan penelitian sudah selaras dengan visi tersebut. Namun, keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) litbang menyebabkan proses penelitian belum berjalan sistematis dan produktivitasnya rendah. Karena itu, penguatan perlu difokuskan pada peningkatan jumlah dan kualitas

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>peneliti, serta memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga litbang lain. Kolaborasi yang aktif antar lembaga litbang diharapkan dapat menumbuhkan budaya dan semangat inovasi dalam mencari solusi untuk permasalahan daerah.</p>
<p>Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Mamasa (Tajuddin dkk., 2021)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa telah menjalankan perannya dengan baik dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah konsultasi publik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti koordinasi, partisipasi masyarakat, dan komitmen pemerintah, serta faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, banyaknya usulan kegiatan, dan kurangnya dokumen pendukung. Peneliti menyarankan untuk pemerintah lebih memprioritaskan aspirasi masyarakat dan meminimalkan hambatan sehingga proses Musrenbang ke depan berjalan lebih efektif dan sesuai harapan bersama.</p>
<p>Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang)</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Bapelitbang Kabupaten Minahasa telah menjalankan perannya dengan baik dalam penyusunan RKPD melalui forum Musrenbang sebagai wadah partisipasi publik. Faktor pendukung dalam proses ini yaitu meliputi koordinasi</p>

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara (Maramis dkk., 2021)</p>	<p>yang efektif, partisipasi masyarakat, dan komitmen pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, banyaknya usulan kegiatan, serta kurangnya dokumen pendukung perencanaan</p>
<p>Optimalisasi Peran Litbang dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu di Kota Bandung (Solahudin dkk., 2022)</p>	<p>Penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan litbang di Kota Bandung belum optimal dalam mendukung inovasi dan kinerja pemerintah. Oleh, karena itu, diperlukan kebijakan dan tata kelola kelitbangan yang menjadi pedoman untuk seluruh pihak yang berkaitan serta strategi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan litbang. Strategi tersebut meliputi pengembangan sistem berbasis teknologi, peningkatan saran dan prasarana, penyediaan SDM peneliti yang kompeten, serta perluasan substansi dan kualitas penelitian. Dengan strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan mutu serta jumlah SDM litbang, hasil penelitian lebih bermanfaat, dan inovasi yang dihasilkan dapat diterapkan serta bernial komersial. Secara keseluruhan, penguatan lembaga litbang diharapkan mampu berperan strategis dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.</p>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Tabel diatas mengungkapkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang linear dengan penelitian ini. Kelima penelitian tersebut sama-sama berfokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, serta proses perencanaan pembangunan. Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus analisisnya yang lebih spesifik, yaitu menganalisis lebih jauh terkait bagaimana lembaga litbang (penelitian dan pengembangan) yang dalam hal ini adalah Balitbangda menjalankan perannya dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan daerah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan (*research gap*) dengan menilai sejauh mana peran Balitbangda dalam menghasilkan penelitian yang tidak hanya dihasilkan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah, sehingga mampu menunjukkan tingkat kontribusi nyata fungsi litbang dalam mendukung kebijakan berbasis riset di tingkat Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lembaga penelitian memiliki peran strategis dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Peran lembaga penelitian dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang benar-benar dimanfaatkan merupakan isu penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini menjadi relevan untuk memahami peran Balitbangda secara mendalam dalam menyusun rekomendasi kebijakan untuk peragkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah khususnya Balitbangda Provinsi Lampung dalam membangun ekosistem kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Balitbangda dalam meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan Serta diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan refleksi terhadap praktik nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam kajian tentang peran lembaga pemerintahan dalam proses perumusan kebijakan publik berbasis riset, serta penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam memahami hubungan antara fungsi kelembagaan penelitian dan proses pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto adalah aspek dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak serta kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan satu peran (Darmawansyah, 2017). Riyadi juga berpendapat bahwa peran adalah orientasi serta konsep dari bagian yang dijalankan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial, pelaku dalam peran tersebut baik individu ataupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga dimaknai dengan tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya) (Darmawansyah, 2017).

Selain Soekanto dan Riyadi pengetahuan terkait peran juga dikemukakan oleh Gibson Invancevich dan Donelly yaitu peran adalah individu yang dituntut untuk menjalin hubungan dengan dua sistem yang berlainan, biasanya dalam konteks organisasi (Lantaeda dkk., 2017). Kemudian Sutarto menyatakan bahwa peran memiliki tiga komponen, yaitu (Lantaeda dkk., 2017):

- a. Konsepsi peran, yaitu: dapat dimaknai sebagai keyakinan atau pemahaman individu mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi suatu situasi tertentu

- b. Harapan peran, yaitu: merujuk pada pandangan atau ekspektasi dari pihak lain terhadap individu yang menempati suatu posisi tertentu, khususnya terkait bagaimana dia diharapkan berperilaku sesuai kedudukannya
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: menggambarkan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menjalankan tanggung jawab pada posisi yang diemban.

Apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara selaras, maka hubungan sosial di masyarakat akan berlangsung dengan baik, berkesinambungan, dan tanpa hambatan yang berarti. Kemudian Soekanto menjelaskan bahwa peran dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu (Lantaeda dkk., 2017):

- a. Peran aktif, yaitu: merupakan jenis peran yang dijalankan oleh individu dalam suatu kelompok berdasarkan kedudukannya sebagai bagian yang berperan langsung dalam aktivitas organisasi atau komunitas tersebut. contohnya dapat berupa pengurus
- b. Peran partisipatif, yaitu: menggambarkan bentuk keterlibatan anggota kelompok yang memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat untuk keberlangsungan kelompoknya. Partisipasi ini mencerminkan kepedulian dan dukungan anggota terhadap tujuan bersama.
- c. Peran pasif, yaitu: bentuk peran yang bersifat tidak langsung atau lebih menahan diri, di mana anggota kelompok memberikan ruang untuk peran atau fungsi lain sehingga dapat berjalan secara seimbang. Sikap pasif ini tetap berperan penting dalam menjaga keharmonisan dinamika kelompok.

2.1.2 Teori Peran

a. Teori peran Soerjono Soekanto

Teori peran dari Soerjono Soekanto digunakan untuk memahami bagaimana seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam struktur sosial. Menurut pandangan ini, setiap lembaga memiliki peran tertentu yang dijalankan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dalam teori ini terdapat empat dimensi utama, yaitu kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas (Lestari & Lestari, 2024).

1) Kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk bertindak atau memberi perintah agar suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks organisasi pemerintahan, kewenangan menjadi landasan penting untuk setiap unit kerja dalam menentukan langkah dan kebijakan yang akan diambil sehingga dapat mencapai sasaran tertentu.

2) Tujuan

Tujuan menggambarkan arah utama yang hendak dicapai oleh lembaga melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Setiap lembaga memiliki tujuan yang disusun berdasarkan fungsi dan kedudukannya, sehingga pelaksanaan peran dapat terukur serta selaras dengan visi dan misi organisasi.

3) Tanggung Jawab

Tanggung jawab mencerminkan kesadaran moral dan profesional seseorang dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Dalam lembaga publik, tanggung jawab berarti menjalankan fungsi kelembagaan secara

optimal untuk mewujudkan target dan manfaat untuk masyarakat serta pemerintah daerah.

4) Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan peran, di mana lembaga menerapkan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam tindakan yang konkret. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara konsisten dan mengikuti ketentuan, prosedur, serta rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan lembaga.

b. Teori peran Biddle dan Thomas

Biddle dan Thomas mengembangkan teori peran untuk menjelaskan bagaimana perilaku seseorang atau lembaga dibentuk oleh harapan sosial dan norma yang berlaku dalam suatu sistem. Mereka menekankan bahwa peran tidak hanya berkaitan dengan tugas formal, tetapi juga dengan ekspektasi, perilaku, dan konsekuensi sosial yang mengikuti pelaksanaan peran tersebut. Teori ini memiliki empat indikator utama, yaitu harapan, wujud perilaku, norma, dan sanksi (Sihaloho dkk., 2024).

1) Harapan

Harapan merupakan pandangan atau ekspektasi dari lingkungan sosial terhadap individu maupun lembaga mengenai bagaimana seharusnya mereka bertindak. Dalam organisasi pemerintahan, harapan ini dapat berupa keinginan masyarakat atau atasan sehingga lembaga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan serta kebutuhan publik.

2) Wujud perilaku

Wujud perilaku adalah tindakan nyata yang ditunjukkan oleh seseorang atau lembaga dalam menjalankan perannya. Dalam konteks organisasi, perilaku tersebut mencakup cara lembaga bekerja, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan pihak lain dalam upaya mencapai tujuan bersama.

3) Norma

Norma merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan peran. Norma berfungsi untuk mengarahkan perilaku sehingga tetap berada dalam koridor yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Sanksi

Sanksi adalah bentuk konsekuensi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan atau norma yang telah disepakati. Sanksi ini dapat berupa teguran, pembinaan, atau tindakan administratif lain yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku serta menjaga kedisiplinan dalam organisasi.

c. Teori peran Robert Linton

Robert Linton memandang peran sebagai wujud perilaku yang dijalankan oleh seseorang berdasarkan status atau kedudukan yang dimilikinya. Teori ini menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dalam sistem sosial dengan mengikuti pola perilaku yang sudah ditetapkan oleh budaya atau norma yang berlaku. Linton mengemukakan tiga indikator dalam peran sosial, yaitu sikap, nilai sosial, dan perilaku (Kiayi, 2024).

1) Sikap

Sikap adalah kecenderungan seseorang dalam menanggapi suatu situasi, objek, atau individu di lingkungan sosialnya.

Sikap mencakup cara berpikir, perasaan, dan kesiapan untuk bertindak yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang menjalankan perannya di masyarakat atau organisasi.

2) Nilai sosial

Nilai sosial merujuk pada keyakinan dan prinsip yang dianggap penting oleh kelompok atau masyarakat. Nilai ini berperan sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi, serta menjadi dasar bagi individu untuk menentukan sikap dan perilaku dalam menjalankan peran sosialnya.

3) Perilaku

Perilaku merupakan tindakan nyata yang dilakukan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks organisasi, perilaku dapat dilihat dari bagaimana individu atau lembaga menyesuaikan diri dengan peraturan, situasi kerja, dan tuntutan peran yang diemban.

Setelah memaparkan ketiga teori peran di atas, peneliti memilih menggunakan Teori Peran menurut Soerjoo Soekanto sebagai teori utama dalam penelitian ini. Alasan pemilihan teori tersebut adalah karena teori Soekanto dianggap paling relevan dengan konteks penelitian yang menelaah peran lembaga pemerintahan, khususnya Balitbangda sebagai lembaga penelitian daerah. Teori ini menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status, dimana setiap individu maupun lembaga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai kedudukannya. Selain itu, teori ini juga bersifat kontekstual karena dikembangkan oleh sosiolog Indonesia dan telah banyak digunakan dalam penelitian mengenai lembaga pemerintahan, sehingga lebih sesuai untuk menggambarkan dinamika birokrasi serta pelaksanaan fungsi lembaga di tingkat daerah. Dengan demikian, teori peran Soerjono Soekanto dipandang paling tepat untuk dijadikan dasar dalam menganalisis peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam penelitian ini.

2.2 Tinjauan Lembaga atau Badan Penelitian

2.2.1 Pengertian Lembaga atau Badan Penelitian

Menurut Undang-Undang (UU) Nomer 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada pasal 1 nomer 12 Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. Pada pasal 8 dijelaskan kembali bahwa lembaga litbang merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lembaga litbang bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaan. Lembaga litbang dapat berupa organisasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat.

2.2.2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

Pergub Provinsi Lampung No. 59 Tahun 2021 menyatakan bahwa Balitbangda mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balitbangda memiliki fungsi yang sangat luas dan strategis, berdasarkan Pergub Provinsi Lampung No. 59 Tahun 2021

Balitbangda mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi. Secara umum, lembaga ini berperan dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan provinsi, penataan wilayah, pengelolaan daerah kepulauan dan laut, penyusunan perangkat daerah, pengelolaan keuangan serta badan usaha milik daerah, hingga peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Selain itu, balitbangda juga turut berperan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pembangunan daerah, kerja sama antarwilayah, serta pengelolaan inovasi dan manajemen sistem inovasi daerah. lembaga ini menjadi aktor penting dalam pembinaan sumber daya manusia pemerintahan, pelaksanaan kebijakan sektoral, hingga pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga selaras dengan kewenangan pemerintah provinsi.

Kemudian Pergub tersebut juga menerangkan terkait tugas balitbangda. Balitbangda memiliki sejumlah fungsi operasional yang mencakup penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, dan penganggaran kegiatan penelitian serta inovasi daerah. lembaga ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan riset, pengkajian kebijakan, serta pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan inovasi di lingkup pemerintahan provinsi. Selain itu, balitbangda berperan dalam membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari lembaga penelitian dalam dan luar negeri, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun masyarakat. Kegiatan pembinaan terhadap perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi, publikasi hasil penelitian melalui jurnal atau buletin, serta fasilitasi penyusunan kebijakan berbasis hasil riset juga menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga ini.

Lebih lanjut, Balitbangda berfungsi memperkuat kelembagaan riset dan inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas peneliti dan

perekayasa, memberikan advokasi, asistensi, serta edukasi terkait pelaksanaan penelitian, dan mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan riset, termasuk riset yang dilakukan oleh warga negara asing. Hasil akhir penelitian yang dilaksanakan balitbangda disampaikan kepada gubernur dan perangkat daerah dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, lembaga ini juga menyelenggarakan administrasi penelitian dan inovasi serta melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh gubernur sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3 Tinjauan Rekomendasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan yaitu suatu program yang dirancang dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu, pengertian ini minitikberatkan bahwasannya kebijakan publik tidak hanya keputusan spontan, tetapi program yang disusun secara seksama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Iriawan, 2024). Sedangkan menurut David Easton kebijakan publik adalah akibat dari aktivitas pemerintah, pendapatnya menyatakan bahwa kebijakan publik dilihat sebagai hasil dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya (Iriawan, 2024).

2.3.2 Tahapan Perumusan Kebijakan

Tahapan perumusan kebijakan publik merupakan tahap yang sangat penting atau krusial dalam siklus pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, di mana keputusan strategis diambil untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Perumusan kebijakan dalam

konteks ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan mempertimbangkan sejumlah alternatif untuk menemukan solusi terbaik. (Iriawan, 2024)

Menurut William N. Dunn (1994) proses perumusan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu:

a. Penyusunan agenda

Pada tahap ini pemerintah menentukan isu atau permasalahan yang dianggap penting dan mendesak untuk dimasukkan ke dalam agenda publik sehingga dapat dicarikan solusi melalui kebijakan yang akan dirumuskan.

b. Formulasi kebijakan

Tahap ini melibatkan proses perumusan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

c. Adopsi kebijakan

Dari beberapa alternatif yang telah disusun, pemerintah kemudian memilih dan menetapkan satu kebijakan terbaik. Proses ini biasanya dilakukan melalui dukungan politik dari legislatif, kesepakatan antarlembaga, atau keputusan hukum yang sah.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diadopsi kemudian dilaksanakan oleh lembaga pelaksana, dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan kebijakan.

e. Penilaian kebijakan

Tahapan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan apakah hasilnya telah memenuhi tujuan yang diharapkan. Penilaian ini

dilakukan oleh unit pemeriksa atau lembaga akuntabilitas pemerintah.

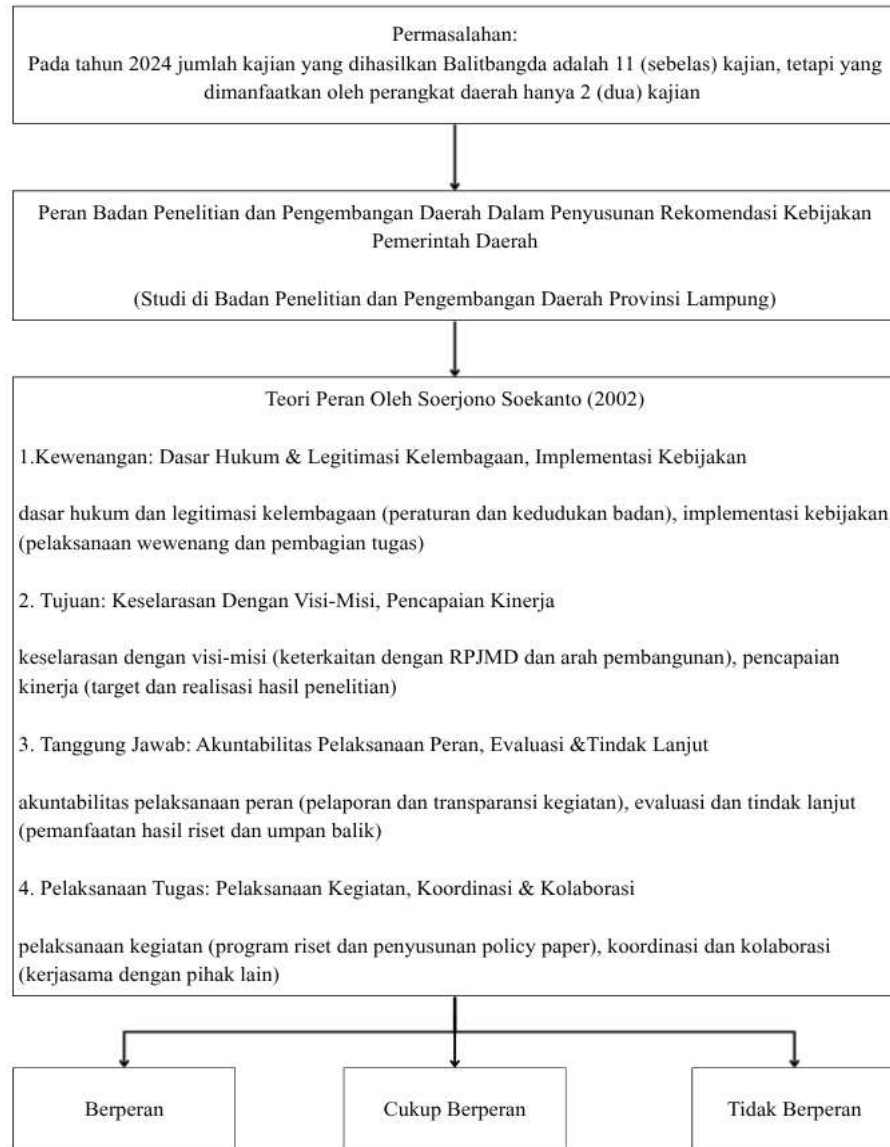
2.3.3 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses perumusan kebijakan publik di daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 209 dan 219, Balitbangda merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang penelitian dan pengembangan. Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia landasan ilmiah dan data empiris untuk pemerintah daerah dalam menetapkan agenda, merumuskan alternatif kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Dengan adanya hasil kajian atau dan rekomendasi dari Balitbangda, proses penyusunan kebijakan menjadi lebih objektif, terukur, dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik, melainkan pada kebutuhan riil masyarakat daerah (Roni, 2016). Selain memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, rekomendasi berbasis riset juga membantu menciptakan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah.

Sejumlah daerah di Indonesia telah membuktikan pentingnya peran lembaga litbang dalam proses ini, seperti Balitbangda Kota Samarinda yang berperan aktif dalam koordinasi inovasi daerah pasca-ditetapkannya PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Wahyuni & Aziza, 2017), serta daerah lainnya seperti Tasikmalaya dan Magelang, Balitbangda juga menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi kebijakan, memastikan kebijakan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan pembangunan daerah (Arifin &

Sakti, 2017). Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Balitbangda tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut bersifat *evidence-based*, kontekstual terhadap karakteristik lokal, dan mampu mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitiannya adalah deskriptif. Metode ini dipilih dikarenakan peneliti ingin fokus dalam menganalisa secara mendalam terkait dengan peran badan penelitian dan pengembangan daerah dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Metode ini membantu peneliti untuk menggambarkan fenomena secara kontekstual dan menyeluruh berdasarkan data yang ada di lapangan, sehingga dapat memahami bagaimana Balitbangda Provinsi Lampung menjalankan fungsinya sebagai lembaga penghasil rekomendasi kebijakan.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap analisis peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Analisis dilakukan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto (2002) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kewenangan: menunjukkan hak dan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan perannya sesuai dasar hukum dan kebijakan yang berlaku. Indikator dari dimensi ini adalah dasar hukum dan legitimasi kebijakan (peraturan dan kedudukan badan), serta implementasi kebijakan (pelaksanaan wewenang dan pembagian tugas)
2. Tujuan: menunjukkan arah dan sasaran lembaga dalam melaksanakan peran untuk mencapai hasil tertentu. Indikatornya adalah keselarasan dengan visi-misi (keterkaitan dengan RPJMD dan arah pembangunan), serta capaian kinerja penelitian (target

kinerja yang ditetapkan serta pencapaian kinerja (target dan realisasi hasil penelitian)

3. Tanggung jawab: mencerminkan komitmen lembaga dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan peran.

Indikatornya adalah akuntabilitas pelaksanaan peran (adanya pelaporan dan transparansi kegiatan), serta evaluasi dan tindak lanjut (pemanfaatan hasil riset dan umpan balik)

4. Pelaksanaan tugas: menunjukkan pelaksanaan peran melalui kegiatan, koordinasi, dan kolaborasi.

Indikatornya adalah pelaksanaan kegiatan (program riset dan penyusunan *policy paper*), serta koordinasi dan kolaborasi (kerjasama dengan pihak lain)

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena Balitbangda merupakan badan penelitian yang memiliki peran strategis dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan daerah, sehingga sangat relevan dengan fokus penelitian ini.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang didapatkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Data primer ini seperti hasil observasi, wawancara, maupun mengumpulkan data melalui kuesioner. Wawancara merupakan salah satu metode yang paling umum dalam mengumpulkan data primer, yaitu peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan yang

kemudian dicatat atau direkam jawaban dari informan tersebut (Sulung & Muspawi, 2024).

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber penelitian yang didapatkan secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara seperti dokumen, literatur, maupun data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, publikasi pemerintah, analisis oleh media, dan lain-lainnya (Sulung & Muspawi, 2024).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

3.5.1 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah upaya dalam mengumpulkan data yang melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan partisipan peneliti (Ardiansyah dkk., 2023). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan pelaksanaan program di Balitbangda yaitu perwakilan dari 4 (empat) bidang yang ada di Balitbangda Provinsi Lampung, 1 (satu) narasumber dari bagian perencanaan yang terjun langsung dalam pembuatan setiap kegiatan dari awal hingga akhir, 1 (satu) peneliti Balitbangda Provinsi Lampung yang berkaitan erat dengan kajian yang dihasilkan serta 2 (dua) narasumber dari perangkat daerah yang pernah menerima rekomendasi kebijakan dari Balitbangda Provinsi Lampung. Berikut merupakan informan yang direncanakan oleh peneliti untuk dilakukan wawancara:

Tabel 3.1 Narasumber yang akan diwawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Annisa Yulyana Pibiand	Analisis Kebijakan Ahli Muda Balitbangda Provinsi Lampung pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
2.	Fitra Utama	Analisis Kebijakan Ahli Muda Balitbangda Provinsi Lampung pada Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah
3.	Tabrani	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda Balitbangda Provinsi Lampung pada Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4.	Eliyati	Perencana Ahli Muda Balitbangda Provinsi Lampung
5.	Nova Anggraini	Ahli Pertama Balitbangda Provinsi Lampung pada Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama

No.	Nama	Jabatan
6.	Adi Asmariadi Budi	Peneliti Ahli Pertama Balitbangda Provinsi Lampung
7.	Sadariah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
8.	Zulkarnain	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

3.5.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis seperti dokumen, arsip, laporan, surat, buku, maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran yang relevan mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang berkaitan dengan topik yang dikaji. (Ardiansyah dkk., 2023).

3.5.3 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Melalui observasi, peneliti memperoleh kesempatan untuk melihat secara langsung interaksi kerja, perilaku pegawai, serta konteks pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung (Ardiansyah dkk., 2023). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati dinamika pelaksanaan kegiatan kajian di Balitbangda, interaksi antarpegawai dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan, serta bentuk pelaporan dan tindak lanjut hasil kajian dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Kegiatan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahan menjadi unit-unit kecil, penyusunan dalam pola yang logis, pemilihan informasi yang relevan, hingga penarikan kesimpulan agar hasil penelitian mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Berikut langkah-langkah dalam melakukan analisis data, yaitu (Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013).

3.6.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi diseleksi dan dirangkum untuk menyoroiti informasi yang sesuai dengan efektivitas program penelitian dan pengembangan daerah (Sugiyono, 2013). Proses reduksi ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga dapat fokus pada aspek-aspek penting sesuai empat indikator peran dari Soekanto.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dengan tujuan agar data lebih terstruktur dan mudah dianalisis (Sugiyono, 2013). Penyajian data ini membantu peneliti dalam menganalisis dinamika pelaksanaan kegiatan kajian.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis serta interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan yang telah diverifikasi melalui perbandingan antar-sumber (Sugiyono, 2013). Proses verifikasi dilakukan secara berulang hingga ditemukan pola yang konsisten dan kredibel mengenai peran Balitbangda dalam menghasilkan kajian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pada tahap penelitian, salah satu proses pentingnya adalah menguji keabsahan data. Uji keabsahan data bertujuan untuk menentukan apakah data yang sudah dianalisis valid atau tidak, data tersebut dapat dinyatakan valid ketika tidak adanya perbedaan antara yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti dengan yang dilaporkan oleh peneliti.

Pada uji keabsahan penelitian ini terdapat 2 (dua) uji keabsahan, yaitu:

3.7.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.

3.7.2 Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan dilakukan dengan menyusun laporan penelitian secara sistematis, rinci, dan jelas agar pembaca dapat memahami konteks penelitian serta menilai kemungkinan penerapan hasil penelitian ini pada instansi atau konteks lain yang serupa.

3.8 Teknik Pengolahan Data

3.8.1 Pengeditan Data (*Editing*)

Pengeditan data dilakukan untuk memeriksa kembali hasil wawancara dan dokumentasi agar data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan kebutuhan, lengkap, serta bebas dari kesalahan atau ketidakkonsistenan sebelum dianalisis lebih lanjut.

3.8.2 Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses penafsiran terhadap hasil analisis data dengan mengaitkannya pada teori peran Soekanto (2002) dan konteks pelaksanaan peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

IV. GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, peneliti menampilkan gambaran umum yang menjadi landasan untuk memahami konteks penelitian secara lebih utuh. Gambaran umum ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh terkait kondisi wilayah, kelembagaan, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Bab ini penting sebagai landasan awal sebelum memasuki bab pembahasan hasil penelitian pada bagian selanjutnya.

Melalui uraian pada Bab IV, diharapkan pembaca dapat memahami secara menyeluruh situasi, karakteristik wilayah, profil kelembagaan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan inovasi daerah. Dengan demikian, bab ini tidak hanya memberikan informasi deskriptif, tetapi juga menjadi landasan analisis dalam mengaitkan kondisi empiris dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

4.1 Sejarah Balitbangda Provinsi Lampung

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2014 yang dibentuk dengan berlandaskan dari Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta berdasarkan Pergub Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata kerjanya. Sebelumnya, Balitbangda merupakan salah satu bidang yang berada di bawah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.

Balitbangda memiliki tugas untuk melaksanakan amanat UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), khususnya pada pasal 34 yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi. Serta pada pasal 79 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayahnya melalui upaya menumbuhkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi antara kelembagaan, sumber daya, dan jaringan IPTEK sebagai bagian dari sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2 Visi dan Misi Balitbangda Provinsi Lampung

4.2.1 Visi

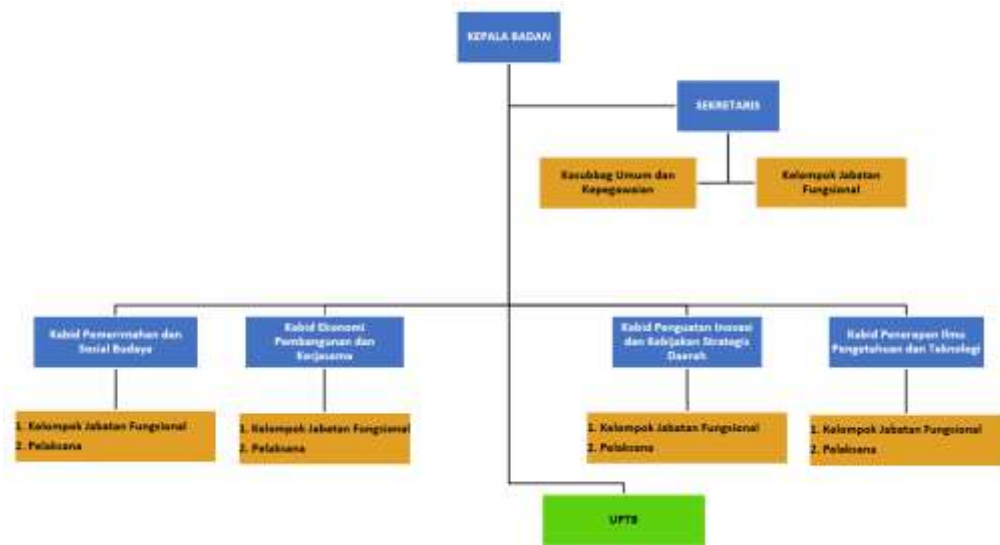
Merealisasikan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perancangan, pengoperasian, serta evaluasi kebijakan daerah yang responsif, antisipatif dan inovatif, dalam mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung.

4.2.2 Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kebijakan strategis pembangunan daerah berbasis IPTEK
2. Mewujudkan inovasi daerah sebagai pengungkit daya saing sektor produksi, sumber daya alam, pengembangan sosial budaya dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan badan penelitian inovasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Menyebarluaskan, mendiseminasikan produk hasil penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung, Balitbangda memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Lampung

Sumber: Data Renstra Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

Struktur organisasi Balitbangda, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- e. Kepala Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- f. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

4.4 Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Lampung

Berdasarkan Pergub Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Balitbangda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

4.4.1 Tugas

Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbang yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balitbangda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi
2. Pelaksanaan riset dan inovasi pemerintah provinsi
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi
5. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga riset dalam atau luar negeri, kementerian atau non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten

atau kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta atau dunia usaha dan masyarakat

6. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi
7. Pengpublikasian hasil-hasil riset kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal riset, buletin dan pusat informasi riset dan inovasi
8. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil riset dan inovasi di provinsi
9. Penguatan revitalisasi kelembagaan riset dan inovasi serta penguatan kapasitas peneliri dan perekayasa di daerah
10. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah
11. Mengeluarkan rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin riset oleh instansi yang berwenang
12. Meminta laporan atas hasil riset yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah
13. Perumusan hasil akhir riset dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi
14. Pelaksanaan administrasi riset dan inovasi
15. Pelaksanaan fungsi lain yang dierikan oleh Gubernur

4.4.3 Rincian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang riset dan inovasi, yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, penginvensian, penginovasian, serta evaluasi kebijakan daerah. Tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan serta koordinasi terhadap hasil riset dan inovasi di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan inovasi dan kebijakan strategis daerah
- b. Merumuskan hasil akhir riset dan inovasi menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur
- c. Memperkuat kelembagaan riset dan inovasi melalui revitalisasi serta meningkatkan kualitas dan jumlah peneliti maupun perekayasa di daerah
- d. Membangun sinergi, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga riset dalam dan luar negeri, kementerian atau lembaga non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat
- e. Menyiapkan serta mengelola data riset dan inovasi
- f. Melaksanakan kegiatan dokumentasi, diseminasi, publikasi, dan penyebarluasan hasil riset dan inovasi kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal, buletin, situs web, atau pusat informasi riset dan inovasi
- g. Menjalankan fungsi kesekretariatan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga riset dan inovasi daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat memiliki fungsi:

- a. Menyusun perencanaan program dan anggaran, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja
- b. Mengelola administrasi dan melakukan verifikasi keuangan, termasuk pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan
- c. Mengatur ketatausahaan, kerumahtanggan, keamanan internal, perlengkapan, pengelolaan aset, serta urusan perpustakaan dan dokumentasi
- d. Mengelola administrasi kepegawaian, melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional, dan melaksanakan evaluasi kinerja aparatur sipil negara
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang pemerintahan dan sosial budaya memiliki tugas untuk melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya memiliki fungsi:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan, dan anggaran riset serta inovasi daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya
 - c. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset serta inovasi daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya
 - e. Memfasilitasi pemebrian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing sebagai dasar penerbitan izin penelitian oleh instansi berwenang
 - f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
4. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama

Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas memiliki tugas untuk melaksanakan, membina, memfasilitasi, serta mengoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, sekaligus memfasilitasi penyiapan serta pelaksanaan kerja sama riset.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama memiliki fungsi berikut:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan, dan anggaran riset serta inovasi daerah di bidang ekonomi, pembangunan, dan kerja sama
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di bidang ekonomi, pembangunan dan kerja sama
- c. Menyiapkan bahan untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset serta inovasi daerah di bidang ekonomi, pembangunan dan kerja sama

- d. Menyiapkan bahan laporan terkait sinergi, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama dengan lembaga riset dalam maupun luar negeri, kementerian atau lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, sektor swasta dan masyarakat
- e. Memfasilitasi kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD), pakar, serta tenaga ahli lainnya
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertugas untuk melaksanakan, membina, memfasilitasi, serta mengoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang ini memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran riset serta inovasi daerah di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah
- c. Menyiapkan strategi dan bahan penerapan hasil riset dan inovasi daerah
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi daerah
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan riset dan inovasi daerah
- f. Menyiapkan bahan publikasi, diseminasi, dan penyebarluasan hasil riset serta inovasi IPTEK

- g. Menyiapkan bahan pengelolaan hasil-hasil riset
 - h. Melaksanakan kegiatan administrasi dan tata usaha
 - i. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan arahan atau tugas tambahan dari atasan.
6. Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah
- Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah bertugas untuk melaksanakan, membina, memfasilitasi, serta mengoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah yang berkaitan dengan penguatan inovasi serta kebijakan strategis daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang ini memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rekomendasi, kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan riset serta inovasi daerah di bidang penguatan inovasi dan kebijakan strategis daerah
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan kegiatan riset serta inovasi daerah
- c. Menyiapkan bahan untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah
- d. Menyiapkan bahan rancangan rekomendasi serta kebijakan yang berkaitan dengan jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
- e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan riset serta inovasi daerah
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan tata usaha
- g. Menjalankan fungsi lain sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

4.5 Sumber Daya Balitbangda Provinsi Lampung

4.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mencapai 65 orang, yang terdiri atas 53 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Adapun rincian dan sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	ASN		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SLTA UMUM	4	1	5
SLTA KEJURUAN	-	1	1
DIPLOMA 3	2	1	3
SARJANA	12	21	33
PASCA SARJANA	9	14	23
JUMLAH	29	36	65

Sumber: Data Renstra Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa ASN Balitbangda Provinsi Lampung terdiri dari 65 pegawai, dengan 29 laki-laki dan 36 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai memiliki pendidikan sarjana sebanyak 33 orang (12 laki-laki dan 21 perempuan), pascasarjana sebanyak 23 orang (9 laki-laki dan 14 perempuan), diploma III 3 orang (2 laki-laki dan 1 perempuan), dan pendidikan SLTA Umum 5 orang (4 laki-laki dan 1 perempuan) serta SLTA Kejuruan 1 orang (1 perempuan).

Selanjutnya, disajikan pula data mengenai persebaran sumber daya manusia Balitbangda Provinsi Lampung berdasarkan golongan kepangkatan, yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Data Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
V	2	5	7
VII	2	-	2
IX	1	2	3
III/a	4	4	8
III/b	4	-	4
III/c	3	3	6
III/d	6	13	19
IV/a	0	9	9
IV/b	3	2	5
IV/c	1	-	1
IV/d	1	-	1
TOTAL			65

Sumber: Data Renstra Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

Tabel 4.2 memperlihatkan komposisi sumber daya manusia Balitbangda Provinsi Lampung berdasarkan golongan kepangkatan. Dari total 65 ASN, jumlah terbanyak terdapat pada golongan III/d dengan 19 pegawai (6 laki-laki dan 13 perempuan), disusul golongan IV/a sebanyak 9 pegawai (seluruhnya perempuan), serta golongan III/a sebanyak 8 pegawai (4 laki-laki dan 4 perempuan). Adapun golongan III/b terdiri atas 4 laki-laki, golongan III/c mencakup 6 pegawai (3 laki-laki dan 3 perempuan), golongan IV/b berjumlah 5 pegawai (3 laki-laki dan 2 perempuan), sementara masing-masing satu pegawai laki-laki berada di golongan IV/c dan IV/d.

Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Balitbangda Provinsi Lampung memiliki 7 (tujuh) Jabatan Struktural, yaitu terdiri dari:

1. Satu orang Kepala, eselon II a
2. Satu orang Sekretaris, eselon III a
3. Empat orang Kepala Bidang, eselon III a
4. Satu orang Kasubbag, eselon IV a
5. Lima Fungsional Analisis Kebijakan
6. Satu Fungsional Keuangan
7. Dua Fungsional Pemanfaatan Iptek
8. Tiga orang Fungsional Peneliti
9. Tiga orang Fungsional Perencana

4.6 Sarana Pendukung

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Balitbangda Provinsi Lampung didukung serta difasilitasi oleh berbagai sarana dan prasarana pendukung yang meliputi:

Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana Pendukung di Balitbangda

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pengadaan	Jumlah
1	Gedung Kantor			
	1. Gedung 2 Lt			
	2. Gedung 1 Lt			
2	Ruang Rapat			
	1. Ruang Rapat Lt 2			1 Ruang
3	Perpustakaan			1 Ruang
4	Kendaraan Roda 4			
	1. Innova	Toyota	2007-2015	5 Unit
	2. Panther	Isuzu	2007	1 Unit

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pengadaan	Jumlah
5	Kendaraan Roda 2			
	1. Smash	Suzuki	2018	2 Unit
	2. Jupiter Z1	Yamaha	2014	1 Unit
	3. Vario	Honda	2018	1 Unit
6	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Bermacam Merk dan Type		18 Unit
	- Laptop	Bermacam Merk dan Type		18 Unit
	- Notebook	Bermacam Merk dan Type		5 Unit
	- Printer	Bermacam Merk dan Type		28 Unit
	- Kamera Digital	Canon Eos	2024	1 Unit
	- Televisi/Smart TV	Bermacam Merk dan Type		4 Unit
	- Speaker/ Loudspeaker	Bermacam Merk dan Type		2 Unit
	- Microphone			
	• Microphone	Bermacam		20 Unit
	• Meja	Merk dan Type		
	• Microphone	Bermacam		4 Unit
	• Wireless	Merk dan Type		
	• Microphone	Bermacam		4 Unit
	• Conference	Merk dan Type		
	- Dispenser	Bermacam Merk dan Type		4 Unit
	- Genset	TGR	2024	1 Unit

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pengadaan	Jumlah
-	Scanner	Cannon	2015	2 Unit
-	AC	Bermacam Merk dan Type		28 Unit
-	Lemari Es	Bermacam Merk dan Type		5 Unit
-	CCTV	Hikvision	2024	8 Unit
-	Monitor CCTV	DVR	2024	1 Unit
-	Proyektor	Infocus		3 Unit

Sumber: Data Renstra Balitbangda Provinsi Lampung, 2025

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perangkat daerah sudah cukup berperan dengan baik. Analisis tersebut dilihat dari empat dimensi yang ada pada teori Soerjono Soekanto yang terdiri dari dimensi kewenangan, dimensi tujuan, dimensi tanggung jawab, dan dimensi pelaksanaan tugas. Secara keseluruhan, Balitbangda telah menjalankan sebagian besar dimensi perannya dengan baik, tetapi masih ada satu dimensi yang perannya masih kurang optimal yaitu dimensi tanggung jawab

Dilihat dari dimensi kewenangan, tujuan, dan pelaksanaan tugas Balitbangda sudah berperan dengan baik. Balitbangda sudah melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukum dan struktur organisasi yang jelas, kemudian riset yang dilakukan juga sudah diselaraskan dengan visi, misi, dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra, dan Balitbangda juga menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan riset secara kolaboratif bersama perguruan tinggi dan OPD.

Sementara itu, pada dimensi tanggung jawab, prinsip akuntabilitas telah diupayakan melalui pelaporan kegiatan dan penyusunan *policy brief*. Namun, aspek evaluasi dan pengendalian mutu hasil riset masih belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, Balitbangda telah membentuk Tim Pengendali Mutu melalui Surat Keputusan Kepala Badan sebagai turunan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, tetapi pelaksanaannya belum

berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan mutu kajian masih bersifat internal antarbidang, sehingga sistem pengendalian mutu belum terimplementasi secara menyeluruh dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan belum maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Balitbangda Provinsi Lampung perlu mempertahankan kinerja yang telah berjalan baik serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Untuk meningkatkan peran pada dimensi tanggung jawab, langkah utama yang perlu dilakukan adalah penguatan mekanisme pengendalian mutu dan evaluasi hasil penelitian. Meskipun telah dibentuk Tim Pengendali Mutu melalui Surat Keputusan Kepala Badan sebagai turunan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, tim tersebut perlu segera diaktifkan secara fungsional agar pengawasan mutu kajian dapat berjalan efektif.

Selain itu, Balitbangda perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian mutu penelitian serta melaksanakan evaluasi pasca-kajian secara berkala dengan melibatkan pihak independen atau mitra akademisi. Kemudian, Balitbangda juga perlu memperkuat posisinya sebagai lembaga penelitian dan pengembangan satu pintu (*one gate policy*) dalam menghasilkan kajian di tingkat daerah, sehingga seluruh proses perencanaan penelitian dapat terkoordinasi secara terpusat, terintegrasi, dan selaras dengan kebutuhan perangkat daerah. Dengan adanya sistem satu pintu tersebut, diharapkan tidak terjadi duplikasi kajian, serta hasil penelitian yang dihasilkan lebih terarah, efisien, dan memiliki peluang implementasi yang lebih tinggi oleh perangkat daerah terkait. Dengan langkah tersebut, Balitbangda diharapkan semakin optimal dalam menghasilkan kajian yang berkualitas, akuntabel, dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan publik berbasis riset di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, S. M. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang Dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah. *The 6th University Research Colloquium 2017*.
- Asmara, A. Y. (2017). Pentingnya Riset Kebijakan Dalam Pembuatan Kebijakan Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 37–46.
- Balitbangda Provinsi Lampung (2025). Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Lampung 2025-2029
- Darmawansyah, R. (2017). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Davies, H., Nutley, S., & Smith, P. (2004). *WHAT WORKS? Evidence-based policy and practice in public services*. The Policy Press.
- Dinworo, A. S. (2013). Peran Institusi Penelitian dan Pengembangan Dalam Perumusan Kebijakan (Studi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik). *Journal Publika*, 1(2).
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2 ed.). Prentice-Hall, Inc.
- Fitrianto, Y., Bintoro, R. F. A., & Hapsari, P. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Daerah. *5th Seminastika*, 5(1).
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik* (Z. R. Bahar, Ed.; 1 ed.). Penerbit Litnus.

- Kiayi, Z. (2024). Peran Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa. *Artikel administrasi publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, 1–24.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Lestari, Ayu, & Lestari, Ariyani. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Baolon Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik (JSP)*, 1(1).
- Maramis, A. P. P. M., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 1(1).
- Muhamad, F. S. (2024, Oktober 8). BRIN tekankan “evidence-based policy” untuk kebijakan berkelanjutan. *ANTARA*.
- Ramadhani, G. C., & Sudiby, D. P. (2024). Evidence Based Policy Formulation dalam Perumusan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta (Studi Kasus Revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug Solo Safari). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(2), 214–230.
- Roni, H. (2016, Juni 15). *Litbang dan Peranannya Terhadap Daerah*. BSKDN. https://bskdn.kemendagri.go.id/website/litbang-dan-peranannya-terhadap-daerah/?utm_source=chatgpt.com
- Sagita, N. I., Centia, S., Taryana, A., & Asiah, N. (2024). Peran Litbang dalam Pengambilan Kebijakan Strategis dan Pemecahan Masalah di Kota Bandung. *Kajian Inklusif Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Menyongsong Era Society 5.0*, 1.
- Satyawati, S. Q., & Fitria, Y. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Untuk Good Governance di Kecamatan Teluk Bayur. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, 5(1).
- Sihaloho, E. R., Winarti, N., & Putra, A. (2024). Peran Dinas Pendidikan dalam Menangani Kesenjangan Pendidikan Masyarakat Pesisir di Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJ)*, 1(1).

- Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu di Kota Bandung *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research*, 5(3).
- Tajuddin, M. S., Silomba, A., & Massyat, M. (2021). Peranan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Mamasa. *Journal Pegguruang*, 3(2).
- Wahyuni, T., & Aziza, T. N. (2017). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(3).
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Sejahtera. *Sibatik Journal*, 4(7).